

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bagian pembangunan Nasional, yang lingkupnya antara lain meliputi peningkatan segi kuantitas dan kualitas pendidikan.

Kualitas sendiri dapat diartikan salah satunya dengan melalui pembenahan dan kelengkapan sarana juga fasilitas pendidikan, sedangkan peningkatan dalam segi kuantitas pendidikan, yaitu memotivasi agar masyarakat sadar dan ingin memperoleh pendidikan setinggi mungkin, sehingga diharapkan penduduk Indonesia akan mencapai taraf pendidikan yang setinggi-tingginya. Demikian halnya dengan segi kuantitas pendidikan beserta peningkatan mutu didalamnya, sehingga lazim dikatakan bahwa "*semakin tinggi taraf pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula taraf produktifitasnya*", dengan kata lain produktifitas yang baik tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi akan lahir melalui proses pendidikan yang dilaksanakan secara tepat guna dan hasil guna (Human Capital, Gary S. Becker, 1967,4).

Pembangunan pendidikan yang berorientasi kepada segi kuantitas telah lama melalui jenjang pelita I sampai dengan pelita berikutnya, yang salah satu tendensinya ; untuk memenuhi masyarakat Indonesia dalam hak dan

kewajibannya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu bahwa *“Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran”* (Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1).

Pada sisi yang lain peningkatan segi mutu pendidikan ditujukan untuk memenuhi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi.

Perkembangan pembangunan dalam bidang pendidikan memiliki peran serta fungsi yang sangat strategis dalam rangka menghadapi tantangan dimasa kini dan masa mendatang, sehingga dapatlah dikatakan bahwa maju mundurnya suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh masyarakatnya, sehingga fungsi utama bagi peningkatan sumber daya manusia adalah dengan peningkatan pendidikan bagi warga dan masyarakat Indonesia.

Perhatian terhadap bidang pendidikan merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan juga dipelihara dengan tujuan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, (Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar, Pemda Tingkat I Jawa Barat, 1997,10).

Dalam Undang-undang No.2 tahun 1989 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu pada pasal ke-14, menyebutkan : bahwa warga negara yang sudah berusia 6 tahun, berhak untuk mengikuti pendidikan, dan yang 7 tahun, wajib mengikuti pendidikan dasar atau yang sederajat sampai tamat (UUSPN, 13).

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang dilaksanakan selama sembilan tahun ; diselenggarakan enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama dan yang sederajat (Sarahan, Buletin Bulanan II tahun 1977,11). Dengan demikian, maka kewajiban bagi setiap warga negara ketika sudah mencapai usia enam tahun sampai tujuh tahun, maka dinyatakan berhak dan wajib mengikuti bahkan sampai menamatkan pendidikan 9 tahun, sehingga apabila seseorang sudah menamatkan jenjang tersebut, maka anak bersangkutan berhak untuk menyandang tamatan pendidikan dasar.

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar merupakan perwujudan dari pada Undang-undang Dasar 1945, GBHN, juga Undang-undang No.2 tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990, yang sebelumnya dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1984, bagi anak-anak usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun.

Berdasarkan kemajuan yang telah dicapai, maka tanggal 2 Mei 1948, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dicanangkan keberhasilannya dalam 15 tahun kedepan. Sehingga pada keputusan semula, pendidikan dasar bagi anak Indonesia dianggap akan tuntas apabila sudah mencapai 15 tahun sejak pencanangannya.

Akan tetapi pengesahan tersebut dicanangkan lagi pada tahun berikutnya pada awal 22 Mei 1996 mengupayakan agar mempersingkat jangka waktu penuntasannya, sehingga dengan kebijakan tersebut, penuntasan Wajib menjadi 10

tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut, berarti bahwa paling lambat pada tahun 2003 awal, masyarakat Indonesia sudah mengenyam dan menamatkan pendidikan dasar, dan pada tahun 2003 nanti Program Pendidikan Dasar 9 tahun dianggap tuntas secara optimal.

Sasaran utama program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah menumbuh kembangkan aspirasi pendidikan bagi orang tua dan anak didik, untuk memasuki pendidikan dasar, sehingga dengan demikian, maka pengertian wajib belajar semakin membuat kita sadar akan pentingnya pendidikan, sebab arti penting belajar bagi masyarakat Indonesia, belum seperti negara-negara maju yang menganggap bahwa *Universal Basic Education*, yakni terbukanya kesempatan secara luas bagi masyarakat atau peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar, sehingga disinilah letak peran penting dari pada administrasi pendidikan untuk mengadakan pembenahan sistem dari pada pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia.

Administrasi pendidikan merupakan salah satu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, kurikulum, atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai hasil pendidikan yang telah disepakati, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai secara optimal dan tercipta susunan dengan baik dalam proses pencapaian, (Engkoswara, 1987, 42), lebih lanjut Engkoswara mengemukakan

bahwa "*administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif yaitu efektif dan efisien*".

Hal yang senada diungkapkan pula kriteria keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan, yang kesemuanya dapat dilihat pada prestasi atau efektifitas dan susunan atau efisiensi.

Pada pendapat lain diungkapkan bahwa "*Productivity is a combination of effectiveness related to performance, efficiency to resource utilization*, (Paul Mail, 1987,7).

Dengan adanya inpres nomor 1 tahun 1994, tentang pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merupakan perkembangan dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun, salah satu dampak yang dirasakan semakin banyak jumlah peserta didik yang wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun padahal wajib belajar 6 tahun pun masih dirasakan banyak yang belum menamatkannya.

Salah satu negara yang sedang berkembang Indonesia, berusaha untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, sejak repelita ke I sampai repelita berikutnya berusaha keras untuk terciptanya pemerataan pendidikan dan keadilan untuk memperoleh kesempatan penuh dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Wajib belajar pendidikan 9 tahun dicanangkan semenjak awal pelita ke IV, dimana hal ini merupakan upaya untuk mencapai pemerataan pendidikan dasar.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi lahirnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, diantaranya yang tercantum di dalam buku pedoman wajib belajar pendidikan dasar untuk Jawa Barat tertulis :

- a. Lebih dari 80 % tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar, termasuk tidak pernah mengikuti pendidikan dasar, hal seperti itu jauh dibandingkan dengan beberapa negara maju di Asean.
- b. Dari segi ekonomi, pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang salah satunya dapat diberikan nilai-nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.
- c. Pendidikan merupakan Investasi Insani (Jhon Vaizey, *The Economic of Education*, 1987,23), oleh sebab itu wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diterapkan secara adil dan merata.
- d. Tenaga kerja yang dianggap sebagai pemegang kapitalis, hal ini tercermin dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga produktivitas kerja, dan hal ini salah satunya bisa terwujud dengan lewat jalur pendidikan (Human Capital ; Gary S. Becker, 1987,32).

- e. Dari segi peserta didik, peningkatan usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, sehingga pada gilirannya tarap kehidupan peserta didik semakin terangkat dengan harapan harkat dan martabat mereka akan semakin dihargai di muka publik.

Sejak dicanangkannya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yaitu pada tanggal 21 Mei 1984, pemerintah optimis akan keberhasilannya dalam program tersebut sebab salah satu bukti menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Indonesia telah meningkat sebesar 80 % atau US\$ 80 pada tahun 1970 dan menjadi US\$ 620 pada tahun berikutnya tahun 1984.

Sementara dalam prakteknya, kenyataan membuktikan bahwa jumlah peserta didik yang masuk dalam kategori wajib belajar enam tahunpun masih banyak yang belum menyelesaikan jenjang tersebut, karena salah satunya ialah hambatan ekonomi keluarga orang tuanya yang relatif rendah, terbukti secara absolut baik lulusan SD maupun siswa baru kelas I SLTP menunjukkan kenaikan yang berarti, namun prosentase angka kelanjutannya hampir tidak beranjak. Data tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa 75,09 % dari anak yang termasuk sekolah dasar dapat menyelesaikan studinya hingga kelas VI (lulus), dan hanya 45,24 % saja dari mereka yang lulus dapat melanjutkan ke SLTP, pada tahun 1969 hal yang sama menunjukkan bahwa mereka lulus dan hanya sekitar 40,00 % saja

dari mereka yang lulus dan mengenyam pendidikan di tingkat SLTP (Britton, 1969:186), keadaan tersebut menunjukkan bahwa upaya mengurangi drop out pada tingkat SD selama ini dapat dinilai "*berhasil*", tetapi upaya meningkatkan angka melanjutkan belum memperlihatkan hasil memuaskan.

Sebagai gambaran hasil perolehan dan kemajuan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sejak dimulai perintisan sampai dengan tahun 1996/1997, dipropinsi Jawa Barat menggunakan salah satu tolak ukur keberhasilan, yaitu dengan angka partisipasi penduduk 13 tahun sampai 15 tahun di SLTP/ sederajat, yang dikenal dengan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) atau yang lazim disebut dengan GER dan NER.

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa perkembangan usia anak 12 tahun dan 13 tahun sampai 15 tahun dalam waktu kurun 1993/1994 sampai dengan tahun 1996 sampai 1997, rata-rata pertumbuhan anak usia 7-12 tahun pada tingkat nasional 3,9, tingkat propinsi 9,07 %, tingkat Kodya 0,10. Memperlihatkan kondisi tersebut Propinsi Jawa Barat dalam pertumbuhan penduduk yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun melebihi tingkat nasional, akan tetapi untuk tingkat Kotamadya Cirebon posisi dari pertumbuhan baik terhadap propinsi, maupun tingkat nasional masih relatif kecil.

Penyelenggara pendidikan dasar dituntut mampu mengelolah dan bahkan mengembangkan segala potensi yang ada, baik potensi alam maupun potensi

sumber daya manusia itu sendiri, yang semuanya dapat dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam UUSPN No.2 tahun 1989 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua, oleh karena sebab itu, untuk mengatur dan mengefektifkan tanggung jawab di maksud maka diterbitkanlah PP No. 39 tahun 1992 mengenai peran serta masyarakat, yang selajutnya dikatakan "*masyarakat berfungsi dan bertanggung jawab untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional*" (UUSPN). Pada pasal ke-3 dikatakan, bahwa peran serta masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

Hal diatas dengan tanggung jawab utama dari seorang administrator , yaitu untuk melaksanakan sistem yang produktif, jadi administrator harus mendayagunakan segala sumber daya yang ada seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan dari sistem tersebut, juga untuk mendayagunakan informasi tentang kinerja yang sedang dan telah dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan operasional yang berkesinambungan.

Sistem pendidikan dan lingkungan sekitarnya berintegrasi secara tetap, oleh karena itu disebut sistem terbuka. Jadi sitem terbuka merupakan sistem yang dipengaruhi oleh sitem lain, baik berfungsi secara atau sebagai input atau output,

analisis input dan output khususnya berguna pada sistem sosial yang kompleks yang disebut organisasi.

Organisasi yang produktif adalah organisasi yang seimbang antara input dan output dapat dinyatakan dalam persamaan yang disebut dengan fungsi produksi. (Moekizat, 1971,47).

Konsep produksi sebaiknya dalam literatur administrasi pendidikan, beberapa tujuan, antara lain :

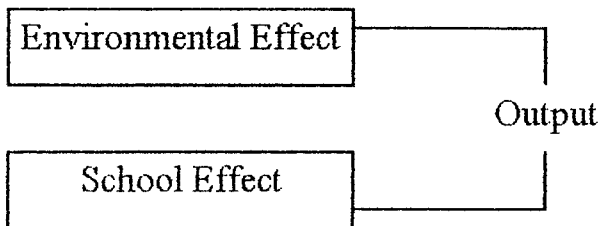
1. Menekankan pada bahwa banyak cara untuk memproduksi pendidikan.
2. Fungsi produksi memberikan dasar secara matematis untuk model pengambilan keputusan.

Fungsi produksi digunakan sebagai dasar untuk menguji tiga tipe yang berbeda mengenai hubungan input-output dari sudut pandang penggunaannya yaitu administrator, psikologis dan ekonomis.

Masalah utama dari analisis sistem tersebut adalah untuk menentukan secara alamiah pengaruh pencapaian dari sekolah dan latar belakang siswa.

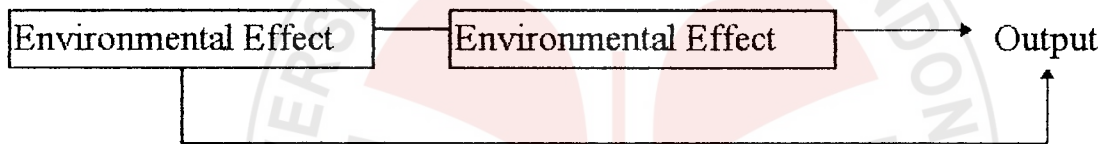
Ada tiga jenis untuk memudahkan pentingnya analisa terhadap lingkungan bagi pendidikan antara lain, dikutip dari buku (The Productive School, J. Alan Thomas ; 1971,17-19).

1. Model Aditif



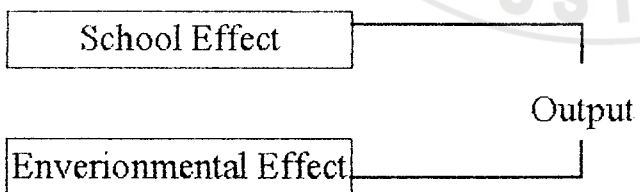
Menurut model ini, pengaruh sekolah dan lingkungan terpisah, tetapi bersifat aditif.

2. Model Sistem Terbuka



Menurut model ini, lingkungan secara alamiah mempengaruhi input sistem sekolah.

3. Model Interaktif



Menurut model ini, interaksi timbal balik antara sekolah dan lingkungannya mempengaruhi kualitas output. Model ini cocok sebagai alat untuk memperjelas tetapi sangat kompleks.

Salah satu lembaga pendidikan yang dianggap merupakan hasil peran serta masyarakat terutama kepedulian akan pendidikan.

Merujuk pada pasal 2 peraturan pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional, maka peran serta masyarakat berfungsi dalam mengembangkan pendidikan nasional.

Dalam mengefektifkan peran serta masyarakat guna mengembangkan pendidikan nasional, maka diperlukan adanya pengembangan hubungan antara lembaga pendidikan dasar dengan masyarakat.

Otong Situmorang menggaris bawahi pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain :

- a. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah.
- b. Untuk menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi.

- c. Untuk mempersatukan orang tua murid dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik.
- d. Untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan.
- e. Untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah.
- f. Untuk mengarahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.

Melihat kondisi diatas, maka terdapat hubungan yang intim sekali antara lembaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dengan masyarakat di mana lembaga tersebut tumbuh dan berkembang. Guna terlaksananya hubungan masyarakat dengan pendidikan maka perlu adanya komunikasi, komunikasi berarti adanya hubungan timbal balik antara sekolah sebagai lembaga pendidik, dengan masyarakat, hubungan yang hal harmonis dari keduanya dapat ditunjukkan melalui :

1. Adanya saling pengertian antara organisasi dengan pihak luar.
2. Adanya kegiatan membantu karena mengetahui peranan masing-masing.

3. Adanya kerja sama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya usaha pihak lain, (Hadari Nawawi, 1988,74).

Madrasah Ibtidaiyah salah satu lembaga pendidikan dasar dituntut untuk semakin tanggap atas kemajuan yang sedang di alami oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga komunikasi yang terjalin dengan baik akan menghasilkan tujuan utamanya guna menggali dan mengembangkan potensi sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat guna mengembangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Sumber daya pendidikan yang dapat digali dari masyarakat dirumuskan oleh Tim Dosen MKDK Administrasi Pendidikan (1991;111) sebagai berikut :

- a. Sumber manusia
- b. Sumber sosial
- c. Sumber kebudayaan dan agama
- d. Sumber lingkungan fisik
- e. Sumber materi dan keuangan

Mengacu kepada buku "*The Productive School* ", seharusnya keterlibatan masyarakat dalam hal pendidikan termasuk lembaga pendidikan dasar semestinya

timbul secara ilmiah sedangkan tugas administrator adalah bagai mana mengelolah dan memanage timbulnya kesadaran tersebut guna menggali sumber daya yang ada di masyarakat tersebut dalam rangka mengembangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Mengacu kepada rangkaian permasalahan serta landasan teori mengenai administrasi pendidikan, seharusnya Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar mampu mengembangkan programnya guna menggali serta memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat dengan mengarah kepada pengembangan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, tetapi pada kenyataannya lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah belum mampu memberdayakan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat secara optimal , selajutnya isu sentral permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah lembaga Madrasah Ibtidaiyah mampu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat dalam mengembangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

B. Masalah

1. *Identifikasi Masalah*

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada masalah bagaimana lembaga pendidikan mampu mengembangkan serta menggali potensi sumber daya

yang ada di masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab bersama baik oleh pengurus yayasan ataupun kepala sekolah sebagai administrator, selain itu pula, tugas administrator berkewajiban untuk melakukan perubahan-perubahan atau pembaharuan sehingga melalui pengembangan sekolah dengan masyarakat akan tercapai tujuan program pengembangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Perubahan yang dibawa oleh lembaga pendidikan diatas, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Levy yang mengatakan bahwa jika negara-negara yang sedang berkembang ingin membuat suatu kebijakan yang efektif untuk mengurangi angka dan tidak normalnya ataupun tingkat drop out dan untuk meningkatkan efesiensi sistem sekolah, maka harus memahami faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya, dengan demikian, maka fokus kajian ini berbicara sekitar tiga faktor utama, yaitu : sosial, ekonomi dan pendidikan.

Beberapa isu permasalahan yang dapat diangkat dibawah ini merupakan permasalahan yang diangkat dengan adanya pencaanangan program wajib belajar pendidikan 9 tahun, diantaranya :

1. Rendahnya ekonomi masyarakat, hal ini akan mempengaruhi pendidikan baik langsung ataupun tidak langsung.

2. GN-OTA merupakan salah satu gerakan yang ikut mendukung bidang pendidikan dasar belum mampu membawa aspirasi masyarakat, sehingga keberadaan lembaga itu sendiri belum diketahui banyak oleh publik.
3. Dengan adanya perencanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun, maka makin bertambah pula anak yang termasuk kedalam usia sekolah yang belum mampu menamatkan pendidikan dasar, sehingga dengan adanya penancangan wajib belajar 9 tahun, maka semakin bertambah pula anak yang drop out dan tidak mampu melangkah kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Lembaga Madrasah Ibtidaiyah dalam hal ini dituntut untuk mencari bentuk hubungan yang ideal antar sekolah sebagai lembaga dengan masyarakat sebagai lingkungannya dimana sekolah tersebut berada, Made Pidarta (1986 :372-3737) mengemukakan bentuk-bentuk hubungan tersebut sebagai berikut :

- a Aktivitas siswa / kelas atau tingkat kelas
- b Aktivitas guru, beberapa guru, atau guru bidang studi
- c Media masa
- d Kunjungan orang tua ke sekolah
- e Pertemuan dengan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan disekolah

Adapun untuk menjalin hubungan tersebut dapat terjadi melalui :

- a Kepala sekolah
- b Guru
- c Siswa
- d BP-3
- e Alumni
- f Mass media
- g Organisasi Kemasyarakatan
- h Kegiatan non sekolah

Kegiatan - kegiatan diatas akan mempengaruhi hubungan atau jalinan informasi yang diperoleh dari masyarakat, juga informasi yang disampaikan oleh sekolah untuk masyarakat akan mempengaruhi terhadap penggalian dan pengembangan potensi sumber daya pendidikan di masyarakat yang dilakukan oleh kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar untuk mengembangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka masalah tersebut dapat diungkapkan dalam sebuah pertanyaan yaitu “ *Sejauh manakah kelembagaan*

Madrasah Ibtidaiyah memanfaatkan potensi sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat ?

2. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dikemukakan beberapa pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a Apakah yang menjadi dasar dan tujuan adanya hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dasar dengan masyarakat ?
- b Bagaimanakah proses pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Madrasah Ibtidaiyah ?
- c Bagaimanakah masukan-masukan dari masyarakat dapat berperan bagi kemajuan Madrasah Ibtidaiyah ?
- d Bagaimanakah bentuk dan kegiatan dari lulusan Madrasah Ibtidaiyah dapat berperan serta aktif dalam pembangunan pendidikan di masyarakat ?
- e Apa sajakah saluran komunikasi yang digunakan dalam proses pembinaan hubungan antara masyarakat dengan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah ? serta metode manakah yang paling tepat untuk dilaksanakan ?

- f Hambatan-hambatan apa sajakah yang dialami oleh pihak lembaga dalam menyampaikan pesan, dan menjalin kerja sama dengan pihak masyarakat ?
- g Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak lembaga untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan-hambatan yang ada ?
- h Bagaimanakah tanggapan pihak masyarakat terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pihak lembaga ?
- i Bagaimanakah hubungan antara kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dengan Instansi terkait ?
- j Bagaimanakah hasil yang diperoleh dengan adanya komunikasi antara pihak lembaga dengan masyarakat dalam rangka peningkatan keefektifan hubungan tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk dapat menjawab pertanyaan pertama yakni “ *sejauh manakah keefektifan antara pihak lembaga Madrasah Ibtidaiyah dengan masyarakat, dan bagaimanakah implikasinya terhadap peningkatan*

kinerja kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di masyarakat”.

Penelitian ini mencoba mengaplikasikan teori tentang pengembangan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan jalan mengungkapkan sejauh manakah keefektifan hubungan antara kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dengan masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Tujuan utama dalam penelitian ini untuk :

1. Mendeskripsikan tujuan dikembangkannya hubungan antara kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dengan masyarakat.
2. Menganalisis saluran komunikasi yang dipergunakan pihak lembaga dalam menjalin hubungannya dengan masyarakat.
3. Mendeskripsikan tanggapan masyarakat mengenai jalinan hubungan antara kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dengan masyarakat.
4. Memperoleh data mengenai kinerja kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dalam memberdayakan masyarakat guna tercapainya pola pengembangan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini secara teoritik bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan dan jenjang setaraf yang lebih tinggi, juga perbaikan kearah pengelolaan sumber daya masyarakat di dalam mengembangkan program wajib belajar, yang ada pada gilirannya akan membuka kesadaran masyarakat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah sehingga program wajib belajar pendidikan 9 tahun akan terlaksana dengan baik khususnya di Kotamadya Cirebon.

Secara praktek penelitian ini berguna bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan keilmuan mengenai hubungan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dengan pihak masyarakat.

Penelitian ini akan menjadi pegangan pokok bagi Administrator pendidikan dasar dalam menjalin hubungannya dengan masyarakat dimana lembaga tersebut berada, sebab pada gilirannya maju mundurnya suatu program pendidikan salah satunya dapat diukur sejauh manakah lembaga tersebut dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak masyarakat.

D. Asumsi-asumsi Tentang Masyarakat

Pertama, Kunci utama untuk memahami organisasi sebagai suatu sistem terbuka adalah adanya pengakuan bahwa “*organisasi itu berinteraksi dengan*

lingkungannya, sehingga perubahan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pihak lembaga manapun harus tetap memperhatikan keberadaan lingkungannya”.

Kedua, Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai pengembang mekanisme pemantauan dan umpan balik serta mengikuti lingkungan dengan cara menghindari perubahan lingkungan dengan membuat penyesuaian yang efektif bila dibutuhkan.

Ketiga, Proses perubahan suatu organisasi dalam rangka mengadakan penyesuaian dengan lingkungannya akan menghadapi tiga tahapan : Mengakui adanya variasi di mana suatu organisasi berada, mengadakan seleksi dari variasi yang paling penting lagi dan kinerja yang menopang kembali variasi yang diseleksi.

Keempat, Organisasi bergantung pada lingkungannya sampai batas tertentu tetapi kita tidak mengabaikan bahwa ada organisasi yang selalu bergantung pada lingkungannya, oleh sebab itu efek lingkungan terhadap suatu organisasi merupakan fungsi dari kerentaannya. (Davis Jacobs ; Dependenci and vulnerability ; an exchange apprauch to the control of organijations, administrative science quarterly, 1974,45).

E. Kerangka Acuan Penelitian

Kerangka acuan penelitian merupakan landasan atau pola pikir yang ditempuh dalam mengkaji permasalahan penelitian. Paradigma ini disusun berdasarkan pada tinjauan terhadap efektifitas hubungan antara pihak lembaga Madrasah Ibtidaiyah dengan lingkungan tersebut berada, hal tersebut ditinjau dari beberapa sudut pandang antara lain ;

Pertama, dengan adanya pencanangan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka semakin bertambah jumlah anak usia sekolah yang drop out, maka dengan adanya kebijakan pencanangan program tersebut, semakin bertambah jumlah anak yang tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi setaraf dengan SLTP.

kedua, Madrasah Ibtidaiyah dalam susunan kepengurusan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berada dibawah komando Depdikbud, sehingga rangkaian kegiatan baik dari program ataupun pelaksanaan mengacu pada program yang telah ditetapkan dan dibawah naungan / pengawasan Depdikbud, walaupun hal ini menyulitkan dalam akurasi data.

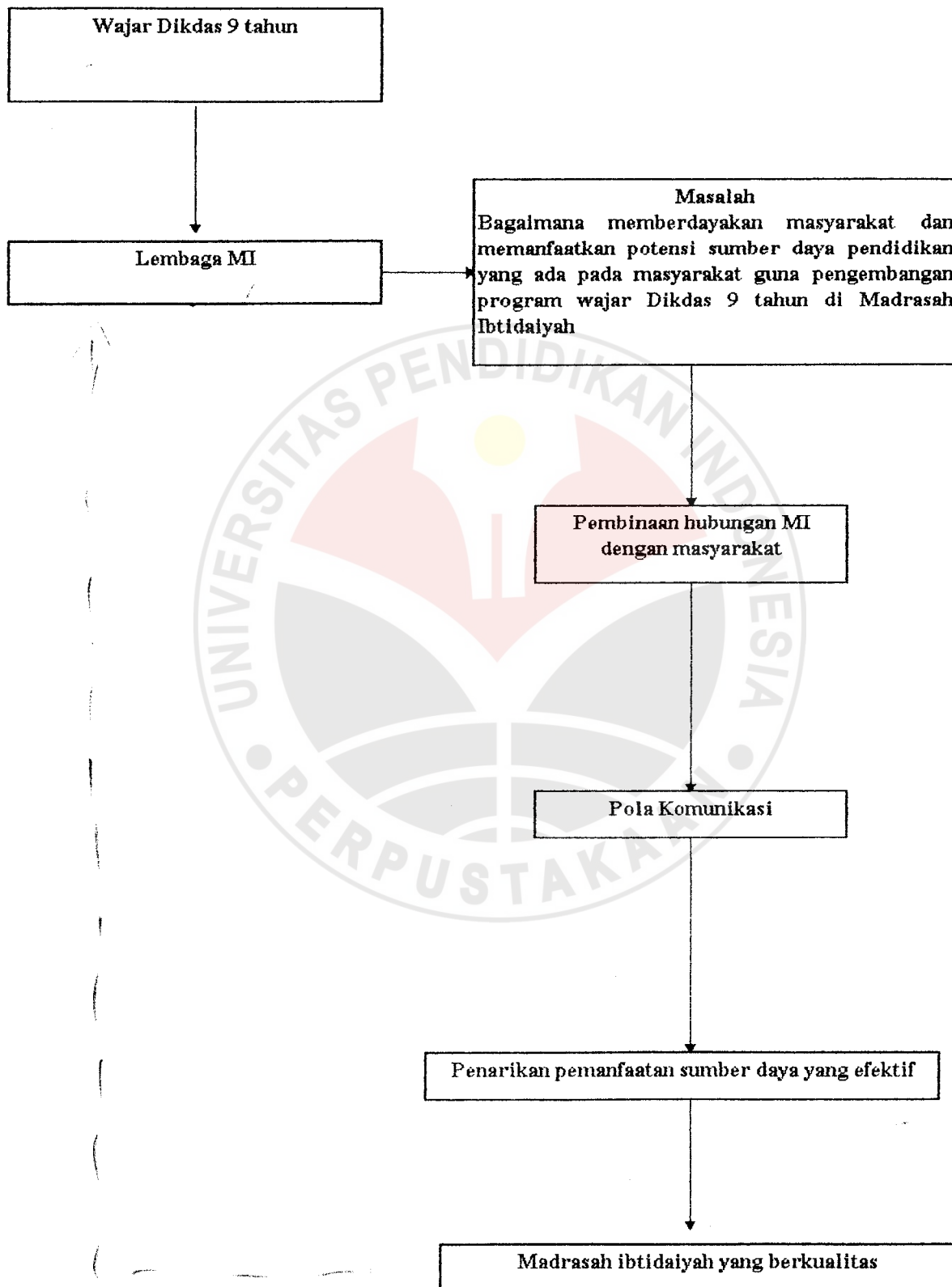
Ketiga, GN-OTA sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam ikut menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kurang dapat berperan secara optimal.

Keempat, rangkaian permasalahan diatas, meumbuhkan peluang bagi kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dengan semakin meningkatkan kinerja guna ikut serta dalam menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Kelima, komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak masyarakat sebagai pendukung dan penyelenggara pendidikan dan institusi sebagai wadah atau arena yang bergerak dalam melaksanakan program pendidikan secara berjenjang.

Keenam, dari ragam sumber daya pendidikan yang dapat digalai dari masyarakat antara lain adalah ; manusia sebagai sumber, sumber sosial, kebudayaan dan agama, lingkungan fisik dari keuangan atau material, dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran



Kerangka tersebut diatas menunjukkan bahwa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan karena tuntutan zaman dan era yang semakin mendorong kita melakukan pembenahan dalam pendidikan dasar, Madrasah Ibtidaiyah dalam hal ini sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar yang mengemban misi yang berat guna mengantarkan siswa ke jenjang pendidikan setaraf lebih tinggi diatasnya untuk dituntut memberdayakan masyarakat, dengan harapan potensi serta sumber daya pendidikan yang ada pada masyarakat tersebut dapat timbul secara alamiah, sehingga pengembangan program wajib belajar pendidikan wajib belajar 9 tahun dapat terwujud.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Administrator pendidikan dasar (kepala sekolah MI) adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada dimasyarakat tersebut secara optimal, beberapa langkah yang ditempuh oleh Administrator pendidikan antar lain menjalin hubungan anatar sekolah dengan masyarakat yang langkah awalnya telah direncanakan dalam bentuk program yang dilaksanakan dengan jalur komunikasi dan dilakukan pengawasan dari kedua belah pihak guna terciptanya hubungan yang efektif.

Dari uraian diatas, maka hasil penelitian dapat tergambar secara umum yang difokuskan kepada :

1. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa

2. Hubungan sekolah dengan alumni
3. Hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lain (lembaga pemerintah dan swasta)
4. Hubungan sekolah dengan yayasan
5. Hubungan sekolah dengan masyarakat

Hasil akhir dari penelitian ini, terfokus pada keefektifan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah sebagai Administrator dan supervisor dalam memanfaatkan potensi sumber daya pendidikan yang ada dimasyarakat.

